BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Pidana di Indonesia dalam rangka menegakkan keadilan mengenal suatu sistem yang disebut sebagai Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Sistem Peradilan Pidana Terpadu merupakan suatu sistem hukum yang dalam pelaksanaan fungsi serta tugasnya harus melalui tahapan tertentu dengan beberapa lembaga hukum yang ada. Penegakan hukum yang adil bagi para pihak yang terlibat, seperti korban, saksi, maupun tersangka haruslah melalui suatu prosedur hukum yang terstruktur. Sistem tersebut setidaknya mencakup empat lembaga yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum, meliputi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat Lapas). Keempat lembaga hukum dengan peran dan tugas masing-masing tersebut haruslah bekerjasama dengan baik dan bersinergi agar tercapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum bagi rakyat Indonesia.

Setiap lembaga hukum yang ada memiliki peranan besar guna tercapainya keberhasilan dalam penegakan hukum. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawentahkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan,

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹ Negara yang baik adalah negara yang mampu melaksanakan penegakan hukum bukan hanya untuk memaksa warganya mematuhi peraturan namun juga mampu melindungi dan mengayomi warga negaranya.

Salah satu lembaga terpenting dalam Tata Peradilan Pidana di Indonesia adalah Lapas. Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah kendali Kementerian Hukum dan HAM. Penghuni Lapas dikenal dengan istilah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Penghuni Lapas terdiri dari tahanan dan WBP. Tahanan adalah sebutan bagi penghuni Lapas yang masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim, sedangkan WBP adalah penghuni Lapas yang telah mendapatkan vonis oleh pengadilan.²

Lapas sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Lapas sebagai muara dalam Tata Peradilan Pidana Indonesia dianggap penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Lapas berfungsi sebagai suatu wadah dengan tujuan dan misi membina serta mendidik WBP agar dapat kembali diterima oleh masyarakat dan melaksanakan fungsi dalam hal kedudukannya sebagai manusia seutuhnya, berperan aktif, dan mendukung pembangunan melalui berbagai aspek.

¹ Soerjono Soekanto, 2013, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hal.5

² https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Pemasyarakatan. Diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 14.00 WIB

Ide keseimbangan dalam tujuan pemidanaan, selain bertujuan membina pelaku dan membebaskan rasa bersalah pelaku, juga bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.³ Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1995 tentang Lapas dijelaskan bahwa, Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah memasyarakatkan kembali warga binaan (Resosialisasi) agar WBP dapat menjalankan peran dan tugasnya dalam masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), resosialisasi dimaknai sebagai salah satu tahapan pelayanan rehabilitasi sosial yang bertujuan agar “bekas klien pemasyarakatan” dapat menyesuaikan diri dalam lingkungan sosialnya. Dalam resosialisasi ini dilakukan serangkaian kegiatan untuk memfasilitasi seseorang atau sekelompok orang yang telah memperoleh layanan pemulihan psikososial

³ Ira Alia Maerani, 2015, Implementasi Ide Keseimbangan Dalam Pembangunan Hukum Pidana Indonesia Berbasis Nilai-Nilai Pancasila, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. II, No.2, Fakultas Hukum Unissula, Semarang, hal. 337

agar dapat kembali ke dalam keluarga dan masyarakat dengan sebaik-baiknya.⁴

Lapas menghadapi banyak permasalahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga muara dalam tata peradilan hukum di Indonesia. Lapas bukan hanya sekedar sebagai tempat pelaksanaan pemidanaan namun juga mengemban tugas untuk meresosialisasikan kembali para WBP. Permasalahan Lapas yang pertama adalah mengenai kelebihan kapastitas di Lapas atau yang sering disebut dengan “*Overcapacity*” atau “*Overcrowding*”. Lapas di masa kini mengalami kelebihan kapastitas yang sangat mengkhawatirkan. Mengenai permasalahan “*Overcapacity*” atau “*Overcrowding*” yang dihadapi oleh Lapas menimbulkan kendala dalam hal membina dan mendidik warga binaan secara efektif.

Populasi penghuni penjara tiap tahun selalu meningkat, maka segaris dengan itu, angka kelebihan penghuni Rutan dan Lapas juga meningkat cukup signifikan. Data per Juni 2017 tercatat bahwa jumlah narapidana di Indonesia sebanyak 153.312 orang. Adapun kapasitas yang dapat ditampung hanya 122.114 narapidana. Berarti secara keseluruhan Lapas di Indonesia mengalami kelebihan penghuni mencapai 25 persen.⁵ Data tersebut menunjukkan bahwa tujuan sistem pemasyarakatan Lapas sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu dukungan yang penuh dari

⁴ <https://www.kamusbesar.com/resosialisasi>. Diakses pada tanggal 15 September 2017 pukul 9.00 WIB.

⁵ <http://www.jpnn.com/news/inilah-tiga-masalah-utama-di-Lapas>. Diakses pada tanggal 15 September pukul 12.30 WIB

berbagai aspek yang ada haruslah dilakukan secara optimal agar Lapas mampu mencapai tujuannya.

Permasalahan kedua yang menjadi perhatian serius di Lapas adalah mengenai kerusuhan di Lapas yang berlanjut pada rawannya narapidana yang kabur. Sistem pemasyarakatan di Lapas telah disusun sebaik mungkin agar menjadi wadah bagi para warga binaan untuk mendapatkan pembinaan, namun justru masih memiliki celah sebagai tempat untuk saling beradu kekuatan dan kekuasaan antar Warga Binaan sehingga menimbulkan permusuhan dan pada akhirnya terjadilah kerusuhan di dalam Lapas. Permasalahan kerusuhan di Lapas ini merupakan salah satu dampak dari *overcapacity* atau kelebihan kapasitas di dalam Lapas.

Permasalahan Lapas selanjutnya adalah mengenai kurangnya petugas penjagaan Lapas. Hal tersebut juga menjadi permasalahan serius yang harus segera diselesaikan demi tercapainya proses pembinaan dan pemberian pendidikan yang efektif kepada Warga Binaan. Total penghuni Lapas dan rutan di Indonesia adalah sebesar 216 ribu orang. Berdasarkan analisis Direktur Jenderal Pemasyarakatan (PAS), menunjukkan adanya kekurangan pegawai ada di angka 40 ribu petugas pengamanan untuk Lapas dan Rutan untuk seluruh wilayah di Indonesia.⁶

Permasalahan keempat yang perlu diselesaikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan di dalam Lapas adalah mengenai metode untuk melakukan optimalisasi terhadap peran Lapas itu sendiri dalam membina dan

⁶<https://news.detik.com/berita/d-3493862/kurangnya-petugas-di-Lapas-terbentur-moratorium-penerimaan-pns>. Diakses pada tanggal 16 September 2017 pukul 9.00 WIB

mendidik warga binaan. Merupakan tantangan yang sangat besar bagi Lapas untuk menemukan cara pembinaan terbaik yang efektif, efisien, dan tepat untuk tidak hanya sekedar sebagai tempat yang “menampung” orang-orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan namun juga sebagai wadah untuk membentuk kembali WBP sebagai insan yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat dan berperan aktif untuk dirinya sendiri juga untuk orang lain.

Permasalahan mengenai keberhasilan penegakan hukum tidak dapat dipisahkan dengan kondisi Lapas kita saat ini. Kondisi Lapas dengan jumlah Warga Binaan yang melebihi kapasitas menjadi cermin nyata yang memperlihatkan kepada kita semua bahwa masih banyak kasus pelanggaran terhadap penegakan hukum. Hal ini juga menjadi koreksi besar bagi lembaga-lembaga penegakan hukum lainnya untuk berupaya lebih baik dalam melakukan usaha dalam rangka menekan angka terjadinya pelanggaran hukum dan penyelesaian permasalahan hukum dengan jalan yang terbaik.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita ketahui bahwa Lapas masih membutuhkan banyak perbaikan dari berbagai aspek. WBP pada dasarnya adalah manusia yang tetap memiliki hak asasi untuk diperlakukan sebagai manusia meskipun label buruk dan bersalah telah melekat pada dirinya. Pembinaan diri pada masing-masing WBP menjadi tantangan Lapas agar membentuk dan memperbaiki insan yang telah memiliki stigma buruk di mata masyarakat atas kesalahan yang telah dilakukan. Tantangan bagi Lapas menjadi makin besar ketika Lapas tersebut bertugas untuk melakukan

pembinaan terhadap para WBP dalam suatu gender yang perlu mendapat perhatian serius dalam kedudukannya di masyarakat yakni perempuan.

Penegakan hukum harus berlaku tegas dan adil bagi seluruh warga negara dan tak terlepas bagi perempuan yang memerlukan perhatian khusus sebagai gender yang masih sering dianggap lemah dan seringkali terjerat dalam suatu kasus hukum baik menjadi korban atau bahkan pelaku dalam kejahatan. Perempuan masih dianggap sebagai pihak rentan (*vulnerable*) terhadap kejahatan. Perempuan tentu saja memiliki kedudukan dan peran yang besar dalam masyarakat, terlebih lagi di masa modern ini perempuan memiliki kedudukan yang sejajar dengan pria. Perempuan memiliki hak, kewajiban, dan kesempatan yang sama dalam berbagai bidang kehidupan termasuk salah satunya bidang pembangunan. Peran perempuan diharapkan sangat maksimal dalam pembangunan negara.

Penanganan serta pencegahan terhadap kasus kejahatan yang melibatkan perempuan baik itu sebagai korban maupun sebagai pelaku haruslah mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah bersama berbagai komponen yang mendukungnya. Sejauh ini, negara masih dianggap kurang responsif terhadap kasus kejahatan yang melibatkan perempuan jika dilihat dari angka kejahatan oleh perempuan terus saja masih meningkat. KUHP sebagai sumber hukum pidana di Indonesia masih dianggap belum responsif pula untuk menangani kasus kejahatan perempuan.

Mengenai kasus kejahatan spesifik gender pun belum menjadi kepedulian yang serius oleh negara di berbagai wilayah, padahal secara

realitas sosial perempuan dan laki-laki jelas memiliki perbedaan dalam kebutuhan pengalaman, sehingga substansi hukum haruslah lebih menjamin dan aspiratif terhadap kepentingan perempuan, terlebih bagi perempuan yang telah menyanggah status sebagai warga binaan perempuan. Warga Binaan perempuan haruslah dibina dengan baik agar memulihkan kembali keadaan diri mereka sehingga siap untuk kembali kepada masyarakat atau yang sering disebut dengan proses resosialisasi.⁷

Lapas Perempuan Kelas II A Semarang juga mengalami berbagai permasalahan seperti yang telah diuraikan di atas. Berdasarkan data terbaru pada hari Selasa 17 Oktober 2017 dari Ditjen PAS menjelaskan bahwa jumlah Warga Binaan di Lapas Perempuan tersebut mencapai 393 orang yang terdiri atas 84 Warga Binaan kasus pidana umum dan 309 orang Warga Binaan kasus pidana khusus ditambah dengan seorang bayi dari narapidana. Kuantitas warga binaan tersebut mengalami *overcapacity* sebesar 126% dengan kapasitas warga binaan yang hanya mampu menampung 174 orang saja.⁸

Berdasarkan uraian data tersebut dapat dilihat bahwa tujuan dari Lapas untuk membina, mendidik, dan memasyarakatkan kembali (Resosialisasi) Warga Binaan belum sepenuhnya terwujud meskipun berbagai upaya telah diusahakan oleh Lapas Perempuan Kelas II A Semarang bersama dengan para komponen pendukungnya. Kejahatan yang melibatkan perempuan masih saja

⁷Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan: Suatu Tinjauan Berwawasan Gender*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 131

⁸<http://smslap.ditjenpas.go.id/public/grl/current/monthly/kanwil/db5f3920-6bd1-1bd1-b847-313134333039>. Diakses pada tanggal 17 September 2017 pukul 12.30 WIB

terjadi dan berulang, jumlah pelaku terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Perlu adanya suatu gagasan yang cerdas guna menyelesaikan permasalahan yang kini sedang menjerat Lapas sebagai muara bagi tata peradilan hukum di negara kita.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai peran yang dilakukan oleh Lapas bersama dengan komponen yang terlibat dalam melakukan pembinaan terhadap para warga binaan. Khususnya dalam penelitian ini adalah warga binaan perempuan, dalam rangka memasyarakatkan kembali (Resosialisasi) di Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dengan judul : **“PERAN LAPAS PEREMPUAN KELAS II A SEMARANG DALAM RESOSIALISASI DAN REHABILITASI WARGA BINAAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis menentukan rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi keterlibatan perempuan sebagai Pelaku dalam Suatu Tindak Pidana?
2. Bagaimana peran Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan sebagai muara dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia?
3. Apa saja kendala yang dialami oleh Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dalam melakukan pembinaan untuk mewujudkan resosialisasi warga binaan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui latar belakang keterlibatan perempuan sebagai Pelaku dalam Suatu Tindak Pidana
2. Untuk mengetahui peran Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dalam pembinaan sebagai muara dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami oleh Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dalam melakukan pembinaan untuk mewujudkan resosialisasi warga binaan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran baru yang bersifat visioner dan terfokus pada permasalahan bagi ilmu pengetahuan hukum dan perbaikan dalam proses perkembangan kebijakan hukum, khususnya pemahaman teoritis mengenai peran Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dalam melakukan resosialisasi warga binaan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menjadi bahan pertimbangan yang memberikan kontribusi bagi

peningkatan peran Lapas Perempuan Kelas II Semarang dalam melakukan resosialisasi warga binaan serta memberikan solusi bagi penyelesaian berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Lapas.

E. Terminologi

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa istilah tertentu, agar tidak terjadi salah dalam penafsiran istilah-istilah yang digunakan maka perlu diberikan suatu penegasan. Adapun istilah-istilah yang perlu mendapatkan penegasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pengertian Peran

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Selanjutnya penambahan istilah –an pada peran menjadi “peranan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁹

Peran menurut Soerjono Soekanto diartikan sebagai suatu proses yang dinamis kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya itu, maka ia dianggap menjalankan suatu peran. Adapun pembagian peran menurut Soerjono Soekanto terdiri dari:

a) Peran Aktif

⁹Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 854

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktivitas kelompok, seperti pengurus, pejabat, dan lainnya.

b) Peran Partisipatif

Peran partisipatif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompoknya sendiri.

c) Peran pasif

Peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok tersebut menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsi lain dalam kelompok sehingga berjalan dengan baik.

Friedman juga mengartikan peran sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan pada seseorang sesuai dengan posisi sosialnya yang diberikan baik secara formal maupun informal. Peran didasarkan pada preskripsi (ketentuan) dan harapan peran yang menerangkan mengenai apa yang para individu harus lakukan dalam suatu situasi tertentu agar dapat memenuhi harapan-harapan mereka sendiri atau harapan orang lain menyangkut peran-peran tersebut.¹⁰

Peran dapat pula diartikan sebagai kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh seseorang karena kedudukannya berdasarkan status sosial khusus yang ia miliki. Lebih

¹⁰<https://adidevi69.wordpress.com/2013/06/08/konsep-peran-menurut-beberapa-ahli/>.
Diakses pada tanggal 20 September 2017 pada pukul 8.00 WIB

lanjut bahwa di dalam peranan terdapat dua jenis harapan, yakni mengenai harapan-harapan di masyarakat terhadap pemegang peran tersebut atau kewajiban-kewajiban dari si pemegang peranan tersebut. Kedua adalah mengenai harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran tersebut terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang memiliki hubungan denganya dalam menjalankan perannya.¹¹

Sehingga peran dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dimiliki sekaligus membatasi seseorang maupun organisasi untuk bertindak dalam suatu peristiwa berdasarkan tujuan dan ketentuan yang ada dan telah disepakati bersama sebagai suatu ketetapan. Peran haruslah dijalankan dengan sebaik mungkin oleh pelakunya agar dapat tercapainya tujuan yang dicitaka-citakan.

2. Pengertian Resosialisasi

Resosialisasi diartikan sebagai suatu proses pelaksanaan suatu penerapan norma, sikap, perilaku, kebiasaan, dan nilai baru dalam suatu kelompok. Resosialisasi diartikan sebagai suatu proses untuk mensosialisasikan atau memasyarakatkan kembali. Resosialisasi dinilai sebagai salah satu tahapan dalam proses rehabilitasi sosial dengan tujuan agar mereka yang dianggap pernah melakukan kesalahan dapat kembali menyesuaikan diri dan berperan aktif di lingkungan sosialnya. Pemasyarakatan kembali tentulah menemui tantangan dan kendalanya tersendiri, mengingat bukanlah hal mudah bagi seorang individu untuk

¹¹<http://www.materibelajar.id/2016/01/definisi-peran-dan-pengelompokan-peran.html>.
Diakses pada tanggal 20 September 2017 padapukul 9. 00 WIB

memiliki kesiapan yang utuh ketika kembali ke lingkungannya. Suatu bentuk perasaan bersalah, kurang percaya diri, malu, atau bahkan merasa takut pasti dialami oleh mereka yang pernah melakukan kesalahan. Sehingga sangat diperlukan peranan yang intensif untuk membantu melakukan sosialisasi bagi seseorang yang pernah melakukan kesalahan.

Resosialisasi berasal dari kata sosialisasi, dimana menurut Soerjono Soekanto sosialisasi diartikan sebagai suatu proses sosial yang menjadi tempat seseorang untuk mendapatkan pembentukan sikap guna berperilaku yang sesuai dengan perilaku orang di sekitarnya. Selanjutnya makna sosialisasi menurut Koentjaraningrat diartikan sebagai keseluruhan proses yang dilihat sejak individu masih kanak-kanan hingga dewasa, berkembang, berhubungan, saling mengenal, dan menyesuaikan diri dengan individu yang lainnya dalam hidup bermasyarakat dengan sekitar.¹²

Berdasarkan pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Resosialisasi diartikan sebagai pemasyarakatan kembali¹³. Pemasyarakatan kembali tersebut memiliki arti bahwa dilakukannya suatu proses untuk membawa kembali seseorang kepada lingkungan masyarakatnya semula agar ia dapat kembali menjalankan perannya.

Guna mewujudkan tercapainya tujuan dari Resosialisasi yang terbaik maka diperlukan serangkaian tindakan yang terarah dan terfokus pada subjek Resosialisasi. Tindakan tersebut haruslah mampu

¹²<https://the-divider.blogspot.co.id/2013/02/pengertian-sosialisasi-dan-menurut-lima.html>.

Diakses pada tanggal 20 September 2017 pukul 12.30 WIB

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit., hal. 952

memfasilitasi dan memberikan pelayanan yang terbaik pula bagi mereka yang disebut sebagai ‘klien pemasyarakatan’. Warga Binaan Pemasyarakatan bukan dipandangan sebagai individu yang harus menjalani hukuman namun merupakan individu yang perlu dibina agar menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Kegiatan Resosialisasi sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis dan sosial para ‘klien’ pemasyarakatan, oleh karena itu unsur pemaksaan dan kekerasan tidak boleh diberlakukan dalam prosesnya. Proses Resosialisasi haruslah dirancang dengan baik melalui suatu proses yang disebut dengan pembinaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan diartikan sebagai usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang terbaik.¹⁴ Pembinaan tersebut dilaksanakan berdasarkan suatu sistem yang disebut sebagai Sistem Pembinaan Pemasyarakatan dan merupakan muara bagi proses hukum pidana di Indonesia.

3. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga diartikan sebagai suatu kesatuan sistem yang kompleks, menyangkut berbagai peraturan yang berlaku di dalamnya yang berhubungan dengan berbagai aspek meliputi politik, hukum, psikologis dan sebagainya. Selain itu di dalam pengertian Lembaga juga dijelaskan mengenai norma-norma yang menjadi ciri khas Lembaga tersebut. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Lembaga diartikan

¹⁴ Ibid., hal. 152

sebagai badan (organisasi) yang tujuannya untuk melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha.¹⁵ Macmillan juga mendefinisikan bahwa Lembaga didefinisikan sebagai seperangkat hubungan norma-norma, keyakinan-keyakinan, dan nilai-nilai yang bersifat nyata, yang terpusat pada kebutuhan-kebutuhan sosial dan serangkaian tindakan yang penting dan berulang.¹⁶

Singkatnya Lembaga diartikan sebagai suatu wadah dimana orang-orang yang memiliki tujuan serta cita-cita yang sama dan telah ditetapkan berkumpul bersama, mereka menjalankan tugas dan fungsinya secara terorganisasi, dipimpin, dan mengikuti suatu aturan tertentu. Lembaga terdiri atas dua aspek, yakni kelembagaan dan keorganisasian. Aspek kelembagaan mengutamakan tata nilai moral dan aturan yang hidup di masyarakat, sedangkan aspek keorganisasian lebih mengutamakan aspek struktural dan mekanisme dalam mencapai tujuan.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pemasyarakatan berasal dari kata masyarakat yang memiliki arti sebagai suatu proses, cara, dan perbuatan memasyarakatkan (memasukkan ke dalam masyarakat, menjadikan sebagai anggota masyarakat, dan sebagainya).¹⁷ Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai tempat orang-orang

¹⁵ Ibid., hal.655

¹⁶ http://acitya-fisip11.web.unair.ac.id/artikel_detail-74972-ArtikelAN_Pengertian%20Lembaga.html. Diakses pada tanggal 22 September 2017 pukul 8.00 WIB

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, Op.cit., hal. 721

menjalani hukuman pidana dan juga diartikan sebagai penjara.¹⁸ Lebih lanjut menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan atau yang disingkat menjadi LAPAS diartikan sebagai tempat melaksanakan pembinaan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Secara umum dapat dilihat bahwa fungsi Lapas sebenarnya ada dua, yakni mengayomi masyarakat dari segala bentuk kejahatan yang mungkin saja terjadi dan membina para terpidana untuk dapat kembali memperbaiki diri mereka.

Lapas sebagai suatu wadah dalam membina Warga Binaan Pemasyarakatan menjalankan suatu sistem yang disebut dengan Sistem Pemasyarakatan. Sistem Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan diartikan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Proses pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan di Lapas diselenggarakan oleh Menteri dan dilaksanakan oleh petugas

¹⁸ Ibid., hal. 655

pemasyarakatan. Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Lapas bukan hanya sebagai suatu tempat penjatuhan pidana saja bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan, namun Lapas lebih diartikan sebagai suatu wadah untuk menjalankan sistem Pemasyarakatan. Melalui Lapas Warga Binaan Pemasyarakatan diayomi, dibina, dididik, dan dipersiapkan agar kelak mereka mampu berperan dengan baik setelah kembali kepada masyarakat dan menjalankan peran sesuai dengan fungsinya. Warga Binaan Pemasyarakatan selama menjalani masa tahanan mereka di Lapas senantiasa dibekali dengan berbagai ketrampilan yang disesuaikan dengan bakat dan minat mereka, hal ini dilakukan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menjadi insan yang lebih baik.

4. Pengertian Warga Binaan Pemasyarakatan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan terdiri atas Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan. Selanjutnya dijelaskan pula dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa:

Pasal 1 ayat (6)

Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 1 ayat (7)

Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

Pasal 1 ayat (8)

Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di LAPAS Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 1 ayat (9)

Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Warga Binaan Pemasyarakatan dapat dikatakan adalah sebagai manusia yang sedang dibatasi kebebasan dan kemerdekaannya dalam bergerak karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merugikan orang lain dalam suatu masyarakat. Sehingga setelah diputus bersalah oleh pengadilan ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui hukuman yang diberikan kepadanya. Melalui berbagai proses pembinaan yang dilakukan WBP diharapkan mampu memotivasi dirinya sendiri dengan niat agar menyadari kesalahannya, tidak mengulangi lagi kesalahannya serta benar-benar ingin memperbaiki diri guna kepentingan sendiri dan lingkungan dimana ia akan tinggal setelah terbebas dari Lapas.

Terkait pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hakekat dari WBP adalah seorang manusia biasa yang tetap memiliki hak dan kewajiban sebagaimana manusia lainnya yang sedang menjalani peran dalam di hidupnya, namun yang membedakan adalah karena ia telah melakukan suatu kesalahan maka dipisahkan di lingkungan tertentu dan

menjalani suatu sistem perlakuan hingga nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan harapan dapat menjadi manusia yang baik dan taat kepada hukum.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro pendekatan yuridis empiris yang selanjutnya disebut dengan penelitian hukum sosiologis adalah pendekatan kepustakaan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum serta bahan-bahan yang mempunyai hubungan permasalahan dan pembahasan dalam penulisan skripsi ini dan pengambilan data langsung pada objek penelitian yang berkaitan dengan peranan Lapas dalam proses resosialisasi WBP.¹⁹

Metode penelitian hukum sosiologis memiliki arti sebagai suatu bentuk penelitian yang dilakukan terhadap kenyataan nyata masyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*), yang kemudian menuju pada identifikasi (*problem-identification*) dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah (*problem-solution*).²⁰

Sehingga secara yuridisnya mengenai peranan Lapas dalam melakukan pembinaan erat kaitannya dengan keberhasilan proses

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 2001, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 10

²⁰ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 10

resosialisasi WBP yang diatur dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.12 Tahun 1995 tentang Lembaga Pemasyarakatan. Secara sosiologisnya peran Lapas tersebut dikaitkan dan dianalisa dengan keadaan nyata dalam masyarakat, serta diutamakan yang berkaitan dengan studi lapangan peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi deskriptif analitis. Suatu tipe penelitian yang menggambarkan, dan menemukan fakta-fakta hukum di masyarakat secara menyeluruh, serta menganalisis secara sistematis peraturan hukum yang berkaitan dengan peran lembaga pemasyarakatan dalam upaya untuk mewujudkan keberhasilan dalam proses resosialisasi WBP pada Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan suatu penelitian guna menemukan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan kemudian dianalisis guna mendapatkan landasan teoritis. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui: *observasi dan wawancara*. Data ini dapat diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
 - 4) Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan
 - 5) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.01.01 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan
 - 6) Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman RI, Menteri Tenaga Kerja RI, dan Menteri Sosial RI Nomor M.01-PK.03.01 Tahun 1984 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Kerja Bagi Narapidana Serta Rehabilitasi Sosial dan Resosialisasi Bekas Narapidana dan Anak Negara
 - 7) Surat Keputusan Bersama Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor M.01-PK.03.01 Tahun 1985 tentang Kerjasama dalam Penyelenggaraan Program Latihan Tenaga Kerja Industrial dan Pemasaran Hasil Produksi Narapidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan kepada bahan hukum primer, terdiri dari:

- 1) Buku-buku, jurnal, atau hasil penelitian yang membahas tentang tinjauan peran Lembaga Pemasyarakatan terhadap proses pembinaan Narapidana dalam rangka melakukan resosialisasi terhadap WBP
 - 2) Berita-berita atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pembinaan terhadap WBP
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - 3) Surat Kabar atau majalah
 - 4) Internet

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah dengan metode pendekatan dan jenis data yang digunakan. Maka teknik dari pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Wawancara

Menurut Charles Stewart dan W.B Cash wawancara diartikan sebagai sebuah interaksi yang di dalamnya terdapat pertukaran atau berbagi aturan, tanggung jawab, perasaan, kepercayaan, motif, dan informasi. Wawancara bukanlah suatu kegiatan dengan kondisi satu

orang melakukan atau memulai pembicaraan sementara yang lain hanya mendengarkan.²¹ Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan kepada para pihak yang terkait dengan peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang, meliputi Sipir Lapas, Petugas Penjagaan dan Pembinaan, dan Warga Binaan Pemasarakatan (WBP).

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Kalau wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.²²

c. Studi Dokumen

Penulis akan melakukan studi dokumen terhadap buku-buku, literatur-literatur, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan peran Lembaga Pemasarakatan yang dapat digunakan untuk menganalisis Peran Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam proses resosialisasi atau memasyarakatkan kembali WBP.

²¹ Haris Herdiansyah, 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Salemba Humanika, , hal. 118

²²*Ibid.*, hal. 145

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

Dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti kualitatif harus cermat dan hati hati dalam memilih dan menentukan partisipan dan lokasi penelitian. Partisipan dan lokasi penelitian yang dipilih harus benar-benar membantu peneliti dalam memahami *central phenomenon*. Identifikasi partisipan dan lokasi penelitian dalam penelitian kualitatif dapat berdasarkan tempat dan individu yang dapat membantu peneliti dalam memahami *central phenomenon*.²³

Penulis melakukan penelitian mengenai peran Lapas dalam hubungannya dengan pelaksanaan proses resosialisasi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dengan subyek penelitian adalah WBP dan petugas penjagaan Lapas yang meliputi Sipir, Petugas Bimbas (Bimbingan Pemasyarakatan), dan Petugas Bimker (Bimbingan Kerja) yang berperan dalam proses pembinaan WBP.

Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini menggunakan teknik *purposeful sampling*. Dalam *purposeful sampling*, peneliti memilih subjek penelitian dan lokasi penelitian dengan tujuan untuk mempelajari atau untuk memahami permasalahan pokok yang akan diteliti. Subjek penelitian dan lokasi penelitian yang dipilih dengan ini biasanya disesuaikan dengan tujuan penelitian.²⁴

²³ Haris Herdiansyah, *op. cit.*, hal. 152

²⁴ Haris Herdiansyah, *op.cit.*, hal. 106

6. Analisis Penelitian

Analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yakni merupakan suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperlukan melalui penelitian yang dilakukan dan selanjutnya ditelaah dan dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan teori lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan di bahas. Metode analisis data pada dasarnya meliputi tiga proses utama yakni:

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan, dalam hal ini data-data yang berkenaan dengan peran Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang dalam melakukan resosialisasi terhadap WBP.²⁵

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles and Huberman (1984) menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data*

²⁵ Sugiyono, *Op. Cit.*, hal 247

in the past has been narrative text". Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan *men-display* data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan hal yang telah difahami. Dalam penelitian ini adalah menyajikan data yang diperoleh dari penelitian yang akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Semarang.²⁶

c. *Conclusion Drawing* (Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesisi atau teori.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis dan berurutan, dimana pada tiap-tiap bab berisi pokok bahasan yang berbeda-beda. Ke-empat bab tersebut saling berkaitan satu sama lain membentuk hubungan dan merupakan satu kesatuan. Adapun secara sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

²⁶*Ibid.*, hal 249

²⁷*Ibid.*, hal. 253

Bab I berisi Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi Tinjauan Pustaka yang terdiri atas tiga bagian, yakni Lembaga Pemasarakatan, Kedudukan Perempuan dalam Konstitusi Indonesia, dan Pandangan Islam tentang Pembinaan dan Perempuan. Bagian Lembaga Pemasarakatan menjelaskan tentang Dasar Hukum Pemasarakatan, Tujuan Lembaga Pemasarakatan, Asas-asas Lembaga Pemasarakatan, Klasifikasi Lembaga Pemasarakatan, Petugas Lembaga Pemasarakatan, dan Warga Binaan Pemasarakatan. Sedangkan bagian Kedudukan Perempuan dalam Konstitusi Indonesia menjelaskan tentang Prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Perempuan dan Kedudukan Warga Binaan Pemasarakatan Perempuan dalam Pembinaan.

Bab III berisi Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Apa Faktor yang Melatarbelakangi Perempuan sebagai Pelaku dalam Tindak Kejahatan, Peran Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dalam Penegakan Hukum sebagai Muara dalam Tata Peradilan Hukum di Indonesia, dan Kendala yang dialami oleh Lapas Perempuan Kelas II A Semarang dalam Melakukan Pembinaan untuk Mewujudkan Resosialisasi Warga Binaan.

Bab IV berisi Penutup yang menguraikan tentang Kesimpulan dan Saran sebagai akhir dari penelitian.